



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Mei 2012

Halaman: 13

2013 Kecamatan Diberi Kewenangan Lebih

YOGYA, TRIBUN - Wilayah kecamatan akan diberi wewenang penuh dalam membuat perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan wilayah. Pelimpahan wewenang ke wilayah ini akan direalisasikan pada 2013.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan. Wasesa, Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta, Jumat (4/5) mengatakan, Peremendagri tersebut mengamanatkan agar pelaksana program perencanaan pembangunan diampu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan.

"Kita akan ambil ceruk program kewilayahan ini," katanya.

Nantinya kecamatan sebagai SKPD

wilayah tak hanya sekedar melakukan koordinasi terkait perencanaan pembangunan saja. "Tapi mereka juga membuat konsep pembangunan wilayah, merencanakan sekaligus melaksanakan. Tidak hanya wewenang tapi juga diberi anggaran," jelasnya.

Menurut dia, dengan dilimpahkannya wewenang lebih besar ke wilayah, proyek pembangunan di 45 kelurahan lebih merata. "Outcome pembangunan akan lebih besar dari segi sosial, ekonomi maupun fisik wilayah," katanya.

Selama ini wilayah hanya diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi soal kebutuhan pembangunan di wilayah. Sebagai pelaksana ada di masing-masing instansi teknis yang menangani.

Wasesa berujar, agar pelimpahan wewenang ke wilayah berjalan optimal, maka sekarang ini

sedang disiapkan sumber daya manusia di setiap kecamatan.

Terkait rencana Pemkot memberikan wewenang lebih besar ke Kecamatan, Camat Gedongtengen, Nur Hidayat mengaku siap melaksanakan kebijakan tersebut. Ia pun mulai mengambil langkah dengan menyusun program pembangunan di wilayah Gedongtengen terutama soal penanggulangan kemiskinan.

Pun pihaknya telah melakukan anggar-ancang namun masih ada kendala yang dihadapi yakni soal sumber daya manusia. Mengingat, katanya di kecamatan Gedongtengen jabatan yang nantinya berperan penting dalam proses pelaksanaan pelimpahan wewenang ke wilayah masih kosong.

"Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan kosong. Kami sudah ajukan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2.			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005